

KEWARGAAN DAN POLITIK PENGAKUAN: PEMENUHAN HAK DASAR KORBAN LUMPUR LAPINDO

SEKAR AYU

ABSTRAK

Bencana Lumpur Lapindo menyebabkan warga korban terpaksa relokasi sehingga mengubah identitas administrasinya. Oleh karena itu pemerintah merencanakan penggabungan kelurahan dan desa sebagai solusi untuk menertibkan kembali administrasi warga korban pasca relokasi. Penelitian ini menjelaskan tentang rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa penggabungan kelurahan dan desa dalam perspektif korban Lumpur Lapindo dengan menggunakan konsep kewargaan dan politik pengakuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan empat subjek penelitian yang terdiri dari dua orang warga korban, satu orang perangkat Kelurahan Siring, serta satu orang Direktur Walhi Jawa Timur. Penulis kemudian menganalisis penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga korban menolak adanya rencana penggabungan kelurahan dan desa serta menuntut pemenuhan atas hak kewargaannya yang berupa hak sosial, hak politik, dan hak sipil, serta adanya politik pengakuan atas identitas aslinya.

Kata Kunci: Lapindo, Relokasi, Administrasi, Penggabungan, Kewargaan, Pengakuan.

***CITIZENSHIP AND THE POLITICS OF RECOGNITION: FULFILLMENT
OF THE BASIC RIGHTS OF LAPINDO MUD VICTIMS***

SEKAR AYU

ABSTRACT

The Lapindo Mud Disaster forced the victims to relocate, thus changing their administrative identity. Therefore, the government plans to merge sub-districts and villages as a solution to restore order to the administration of victims after relocation. This study describes the Sidoarjo District Government's plan to combine sub-districts and villages from the perspective of the victims of the Lapindo Mudflow using the concepts of citizenship and the politics of recognition. The method used in this research is the descriptive-qualitative method through primary and secondary data collection. The author collected primary data through interviews with four research subjects, consisting of two victims, one Siring Village official, and one Director of Walhi East Java. The author then analyzes this research using narrative analysis techniques. The results of this study indicate that the victims reject the plan to merge sub-districts and villages and demand the fulfillment of their citizenship rights in the form of social rights, political rights, and civil rights, as well as the political recognition of their real identities.

Keywords: *Lapindo, Relocation, Administration, Merger, Citizenship, Recognition.*